

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI LAYANAN SAMSAT KELILING

Suci Lestari Anggraeny¹

anggraenylestarisuci@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Khaerul Umam²

khaerulumam20@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Layanan Samsat keliling terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mendekatkan layanan pembayaran pajak/retribusi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, keberadaan samsat keliling memudahkan wajib pajak, khususnya yang berada jauh dari kantor induk, yaitu dengan mendatangi lokasi pelayanan samsat keliling terdekat. Adapun lokasi jadwal pelaksanaannya setiap hari pada lokasi yang telah di tentukan. Layanan yang diberikan oleh samsat keliling adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan sekaligus pengesahan surat tanda nommor kendaraan (STNK) tahunan bagi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Selain itu penulis menilai keberadaan samsat keliling efektif karena pencapaian target dan penerimaan, efesiensi waktu pelayanan, dan kepuasan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pendapatan asli daerah berkembang sebelum dan sesudah samsat keliling.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Samsat Keliling

ABSTRACT

The mobile Samsat service has proven to be effective in increasing Regional Original Revenue (PAD) revenue because it brings tax/levy payment services closer to the community. Based on the results of observations during the internship activities, the existence of mobile samsat makes it easier for taxpayers, especially those who are far from the main office, by visiting the nearest mobile samsat service location. The location of the implementation schedule is every day at a predetermined location. The services provided by the mobile samsat are annual motor vehicle tax (PKB) payment services as well as the ratification of annual vehicle number plates (STNK) for two-wheeled and four-wheeled motor vehicles. In addition, the author considers the existence of mobile samsat to be effective because of the achievement of targets and revenues, efficiency of service time, and taxpayer satisfaction. This is evidenced by the original income of developing regions before and after the mobile samsat.

Keywords: Effectiveness, Mobile Samsat, Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Samsat Merupakan bentuk kerja sama dari Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan Pt Jasa Raharja (Persero). Dalam menerbitkan STNK (Surat dan Tanda Nomor Kendaraan), Serta Tanda nomor kendaraan bermotor yang berhubungan dengan pemasukan uang ke dalam kas negara melalui Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan bermotor (BBNKB), (SWDKLLJ) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Semua kegiatan proses administrasi ini di lakukan di dalam satu kantor yang sering kita sebut dengan nama kantor SAMSAT. Untuk penerbitan STNK merupakan tugas dari POLRI, Penetapan Besaran Bayaran Pajak (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Merupakan Tugas Dari BAPENDA Provinsi dan untuk Pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) ialah PT jasa Raharja yang bergerak di bidang asuransi.(Julfaidin & Manduapessy, 2024)

Masyarakat mengatakan Pelayanan (SAMSAT) masih di katakan sebagai proses yang sangat rumit Lokasi kantor samsat yang jauh merupakan salah satu alasan. Kurangnya pegawai di dalam kantor samsat yang membuat memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembayaran pajak, yang mengharuskan masyarakat untuk menunggu yang memakan waktu berjam-jam karena proses administrasi pembayaran pajak karna harus mengantri dan juga setiap masyarakat di haruskan melewati beberapa pintu loket terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses tersebut. Fasilitas yang kurang juga membuat masyarakat merasa kurang nyaman berada di dalam ruangan kantor seperti pendingin ruangan yang kurang kursi tunggu yang belum memadai yang membuat sebagian masyarakat menunggu di luar ruangan. Hal-hal seperti ini lah yang membuat masyarakat malas untuk ingin membayar pajak. Dalam Usaha untuk meningkatkan pembayar pajak samsat membuat inovasi pelayanan yang baru agar masyarakat puas dengan pelayanan yang di lakukan karena selama ini yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat serta tuntutan masyarakat kepada pemerintah ialah meningkatkan kualitas pelayanan. Samsat Keliling merupakan inovasi yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatan administrasi pemabayaran pajak. Salah satu bentuk inovasi pelayanan yakni samsat keliling. Samsat Keliling memiliki beberapa layanan seperti pengesahan STNK setiap tahun, pemabayaran PKB dan SWDKLLJ. Oleh Karena itu Tujuan Magang ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prograam Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi mekanisme pelayanan, jadwal operasional, dan jenis layanan yang diberikan, Untuk menganalisis efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai bahan referensi akademik mengenai efektivitas pelayanan publik dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan Samsat Praya dalam meningkatkan kualitas layanan Samsat Keliling, mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta memperluas akses pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kemudahan dan manfaat layanan Samsat Keliling dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman praktis dalam pengelolaan PAD dan pelayanan publik.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Samsat Keliling (SAMLING)

Samsat keliling merupakan salah satu bentk inovasi pelayanan public di bidang adminstrasi kendaraan bermotor. Layanan ini memberikan fasilitas Pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kendaraan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahunan melalui sistem pelayanan bergerak. Konsep pelayanan Samsat keliling dikenal dengan metode jemput bola, yaitu, mendatangi langsung pemilik kendaraan/wajib pajak jauh dari pusat pelayanan Samsat utama. Tujuan utama dari penyelenggaraan Samsat Keliling adalah untuk meningkatkan memudahkan akses pelayanan

bagi wajib pajak, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala jarak, waktu, maupun biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Menurut penulis, keberadaan samsat keliling menjadi solusi atas keterbatasan pelayanan konvensional yang selama ini terpusat di satu beberapa lokasi, karena layanan ini mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

Fungsi Utama Samsat Keliling

Samsat Keliling memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung publik dan pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu fungsi utamanya adalah mendekatkan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat dengan menyediakan layanan dilokasi strategis yang mudah dijangkau. Melalui layanan ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB, dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan tanpa harus datang langsung ke kantor samsat induk. Selain itu, samsat keliling juga berfungsi untuk mengurangi kepadatan antrean di kantor samsat induk. Dengan dialihkannya Sebagian pelayanan ke unit keliling, proses pelayanan menjadi lebih efisien dan tungggu waktu masyarakat dapat diminimkan.

Menurut penulis, fungsi lain dari samsat keliling adalah sebagai sarana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya kemudahan pelayanan dan kepathan wajib pajak, penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan sehingga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan asli daerah.

Manfaat Samsat Keliling (SAMLING)

Pelaksanaan Samsat Keliling memberikan berbagai manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah. Bagi masyarakat, layanan ini memberikan kemdahan dalam melakukakn pembayaran pajak kendaraan bermotor karena lokasi pelayanan lebih dekat, proses lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini membantu masyarakat menghemat biaya transportasi serta mengurangi beban administrasi. Bagi pemerintah daerah, samsat keliling berperan dalam meningkatkan tingkat kepathan wajib pajak. Dengan pelayanan yang lebih mudah diakses, masyarakat terdorong untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga potensi tunggaakan pajak kendaraan bermotor dapat ditekan. Selain itu layanan ini membantu mengurangi antrean kantor samsat induk dan meningkatkan efesiensi kerja teratur.

Menurut penulis, manfaat samsat keliling tidak hanya terbatas pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga meningkatkan citra positif pemerintah daerah melalui pelayanan publik yang responentif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Definisi Pajak

Definisi pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan dipungut tanpa adanya biaya imbalan secara langsung, namun hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan pembangunan masyarakat nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pajak, negara memperoleh sumber perdanaan yang digunakan untuk menyediakan layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya.

Menurut penulis pajak tidak dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dan nasional. (Winarsih, 2022).

Jenis – Jenis Pajak

Secara umum, sistem perpajakan di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan daerah. (Fahira et al., 2025). Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). contoh pajak pusat antara lain pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBP), dan Bea Materai. Sementara itu, Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/kota antara lain mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame

Menurut penulis, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah karena menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan langsung untuk pembiayaan per' publik di daerah. gunan dan pelayanan (Fahira et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. PAD diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan penuh kepada pemerintah pusat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang isinya pajak daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi juga pengelolaan sumber daya alam. Menurut Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang didapatkan daerah sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungun berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi pengumpulan pendapatan asli daerah harus didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi berlebihan terhadap pendapatan utama daerah akan terus membebani masyarakat dan mengancam perekonomian (Kakasih et al., 2018) (Arifin, 2024).

Menurut penulis, optimalisasi PAD harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa mendapatkan manfaat langsung dari pajak dan retribusi yang dibayarkan.

Jenis - Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak daerah, Retribsi Daerah, hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain Pendapatan asli yang Sah (Irwadi & Winarni, 2024).

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan rumah makan, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah. Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai.

Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang direncanakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu pelaksanaan. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi antarunit kerja, serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. (Yusni et al., 2020).

Menurut penulis, efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan instansi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif kualitatif Kegiatan magang ini dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di Uptb Uppd Prya yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari Senin hingga Kamis pukul 07.30-

14.30 WITA, hari jum'at pukul 07.30-13.30 WITA, sedangkan hari sabtu pukul 07:30-13:30 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang Uptb Uppd Praya yaitu sebagai berikut:

1. Penulis Melakukan Perkenalan dengan pegawai maupaun staf, serta diberikan pengarahan selama proses praktik kerja lapangan yang berkaitan dengan jam kerja, istirahat, dan jam pulang.
2. Penulis Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Memilah notice Pajak / SKPD (Surat Keteapan Pajak Daerah) sesuai warna, Mengikuti kegiatan Imtaq hari Jum'at, Membersihkan ruang arsip seperti Nyapu, ngepel setiap pagi.
3. Penulis Membersihkan Ruang arsip, Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Memilah notis pajak sesuai warna, Mengikuti kegiatan Imtaq, Menyecan notis dan merename notis sesuai dengan plat nomor yang ada.
4. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Memilah notis pajak sesuai warna, Memilah Surat teguran, Menyecan notis pajak, Mengikuti kegiatan Imtaq.
5. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Memilah notis pajak, Mengikuti pelayanan delivery, Mengikuti kegiatan Imtaq, Mengikuti pelayanan Samling III.
6. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Mengantar berkas wajib Pajak, Memilah notis pajak sesuai warna, Memilah notis online (notis yang di luar Lombok tengah), Mengikuti Kegiatan Imtaq
7. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Memilah notis kendaraan sesuai warna, Membantu memasukkan nilai pajak di setiap layanan, Mengikuti kegiatan Imtaq, Mengikuti Senam pada Hari Sabtu.
8. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Memilah notis sesuai warna, Menyecan dan merename notis sesuai dengan plat kendaraan, Mengikuti kegiatan delivery, Mengikuti kegiatan Imtaq.
9. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Memilah notis sesuai warna, Mengikuti kegiatan Imtaq, Mengikuti pelayanan di Samling III.
10. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Megikti kegiatan Imtaq, Memilah notis sesuai warna, Memilah notis online (notis yang di luar Lombok tengah).
11. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Memilah notis sesuai warna, Mengikuti kegiatan gotong royong di Drive Thru Praya.
12. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Memilah notis sesuai warna, Mengikuti kegiatan sosialisasi di desa bodak, Membantu memasukkkn notis online yang akan di kirim.
13. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti kegiatan apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Mengikuti kegiatan sosialisasi di kantor desa pengadang, Membantu mendaftarkan kendaraan baru, Memilah notis.
14. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Memilah notis sesuai warna, Membantu membuat kopi.
15. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Memilah notis, Membantu pendaftaran kendaraan baru.
16. Penulis Membersihkan ruang arsip, Mengikuti apel pagi (senin-kamis), Mengikuti kegiatan Imtaq, Memilah notis sesuai warna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya dilaksanakan melalui alur pelayanan yang sederhana dan cepat, dimulai dari wajib pajak datang ke lokasi layanan Samsat Keliling dengan membawa persyaratan berupa STNK asli dan KTP asli yang sesuai dengan data kendaraan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi data kendaraan serta identitas wajib pajak. Setelah data dinyatakan lengkap dan sesuai, petugas menghitung besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan, termasuk denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran. Selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara langsung di tempat pelayanan, dan setelah pembayaran selesai, petugas memberikan bukti pembayaran serta melakukan pengesahan STNK tahunan. Seluruh proses pelayanan ini dilakukan dalam satu lokasi tanpa perlu mendatangi kantor Samsat induk, sehingga memudahkan masyarakat, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Lokasi Pelayanan Samsat keliling Praya berada di Rebitah, Taman Bao, Batujai, Batu Nyale.

Jadwal Operasional Layanan

Jadwal Operasional Layanan Samsat Keliling Praya yaitu Pagi Jam 08:00-12:00 Siang Jam 13:00-17:00

Tabel 1. Lokasi Pelayanan

Jam Layanan Samsat Keliling Praya	Lokasi Layanan Samsat Praya
Pagi 08:00-12:00	Samling I (Batujai)
Siang 13:00-17:00	Samling I (Batujai)
Pagi 08:00-12:00 s/d Siang 13:00-17:00	Samling II Rebitah
Pagi 08:00-12:00	Samling III Batu Nyala
Siang 13:00-17:00	Samling III Depan Resort Praya
Pagi 08:00-12:00	Samling IV Taman Bio
Siang 13:00-17:00	Samling IV Sukarara

Jenis Layanan yang diberikan

Jenis layanan yang diberikan dalam program Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya pada umumnya meliputi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan sekaligus pengesahan STNK tahunan bagi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan tanpa harus datang ke kantor Samsat induk. Selain itu, Samsat Keliling juga sering dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kebijakan perpajakan daerah, seperti informasi terkait keringanan pajak atau penghapusan denda pada periode tertentu. Namun demikian, layanan yang memerlukan proses administrasi lanjutan, seperti perpanjangan STNK lima tahunan, balik nama kendaraan, mutasi kendaraan, serta penggantian dokumen kendaraan, tidak dilayani di Samsat Keliling dan wajib dilakukan langsung di Kantor Samsat Praya.

Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas Program Samsat Keliling dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dapat dianalisis melalui

beberapa indikator, yaitu pencapaian target penerimaan, efisiensi waktu pelayanan, serta tingkat kepuasan wajib pajak. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana program Samsat Keliling mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan dan kemudahan pelayanan perpajakan bagi masyarakat.

1. Efektivitas Pencapaian Target Penerimaan

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, keberadaan Samsat Keliling berperan sebagai pendukung dalam upaya pencapaian target penerimaan PKB. Layanan ini memperluas jangkauan pelayanan perpajakan hingga ke wilayah yang jauh dari kantor Samsat induk, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kemudahan akses tersebut mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB, yang pada akhirnya membantu meningkatkan realisasi penerimaan dan mendekatkan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan layanan samsat keliling, terlihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu, bahkan Sebagian di antaranya merupakan wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran. Peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui samsat keliling secara langsung berdampak pada bertambahnya realisasi penerimaan PKB. Dengan semakin luasnya jangkauan pelayanan dan meningkatnya partisipasi masyarakat, samsat keliling secara bertahap membantu mendekatkan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas Efisiensi Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, Program Samsat Keliling dinilai efektif dari sisi efisiensi waktu pelayanan. Hal ini terlihat dari proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan di kantor samsat induk. Pada layanan samsat keliling, prosedur yang diterapkan relatif lebih sederhana dan focus pada jenis layanan tertentu, sehingga alur pelayanan menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selain itu, antrian yang terjadi selama pelayanan samsat keliling cenderung lebih singkat. Wajib pajak tidak perlu menunggu lama karena jumlah pengunjung dapat dilayani secara bergantian dengan cepat. Kondisi tersebut membuat masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari dalam waktu lama. Efisiensi waktu pelayanan ini menjadi salah satu factor utama yang mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan samsat keliling.

3. Efektivitas Kepuasan Wajib Pajak

Dari aspek kepuasan, Samsat Keliling memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Wajib pajak merasa terbantu dengan adanya pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan praktis, sehingga mengurangi kendala jarak dan waktu. Tingkat kepuasan tersebut tercermin dari antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan Samsat Keliling serta meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan aspek kepuasan wajib pajak, Program Samsat Keliling dapat dinyatakan efektif. Keefektifan tersebut terlihat dari kemampuan layanan Samsat Keliling dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat melalui lokasi pelayanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal wajib pajak. Kemudahan akses ini mengurangi kendala jarak dan waktu yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk datang ke kantor Samsat induk. Selain itu, prosedur pelayanan yang sederhana dan proses pembayaran yang dilakukan dalam satu lokasi membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis, sehingga

wajib pajak tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepuasan wajib pajak juga tercermin dari respons dan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan Samsat Keliling. Banyaknya wajib pajak yang menggunakan layanan ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman. Kepuasan tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara tepat waktu. Dengan demikian, dari sisi kepuasan wajib pajak, Program Samsat Keliling tidak hanya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Program Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diterapkannya Program Samsat Keliling, analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode sebelum dan setelah program tersebut berjalan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program Samsat Keliling memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Akses pelayanan	Terbatas pada kantor samsat induk	Lebih luas melalui layanan samsat keliling
Kemudahan pembayaran	Relatif kurang praktis	Lebih mudah dan mendekati masyarakat
Partisipasi wajib pajak	Masih terbatas	Meningkat
Relisasi penerimaan PKB	Rp 55.342.465.000	Rp 114.358.390.000
Dampak terhadap PAD	Belum Optimal	Meningkat Signifikan

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang

1. Akses Pelayanan

Sebelum diterapkannya Samsat Keliling, akses pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya tersedia di kantor Samsat induk sehingga jangkauan pelayanan masih terbatas. Setelah adanya Samsat Keliling, akses pelayanan menjadi lebih luas karena layanan mendatangi langsung wilayah masyarakat melalui unit pelayanan keliling.

2. Kemudahan Pembayaran

Sebelum Samsat Keliling, proses pembayaran relatif kurang praktis karena wajib pajak harus datang ke kantor Samsat induk. Setelah Samsat Keliling diterapkan, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan mendekati masyarakat sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Partisipasi Wajib Pajak

Sebelum adanya Samsat Keliling, partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih terbatas. Setelah program Samsat Keliling berjalan,

partisipasi wajib pajak meningkat seiring dengan kemudahan akses dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

4. Realisasi Penerimaan PKB

Sebelum diterapkannya Samsat Keliling, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tercatat sebesar Rp55.342.465.000. Setelah program Samsat Keliling diterapkan, realisasi penerimaan PKB meningkat menjadi Rp114.358.390.000, yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah.

5. Dampak terhadap PAD

Sebelum Samsat Keliling diterapkan, kontribusi penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai belum optimal. Setelah program Samsat Keliling berjalan, peningkatan realisasi penerimaan PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum diterapkannya program Samsat Keliling, realisasi penerimaan PKB masih relatif terbatas karena akses pelayanan yang hanya terpusat di kantor Samsat induk serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak. Setelah program Samsat Keliling diterapkan, terjadi peningkatan aksesibilitas pelayanan melalui sistem jemput bola yang mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga mendorong peningkatan partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB. Peningkatan partisipasi tersebut tercermin dari naiknya realisasi penerimaan PKB dari Rp55.342.465.000 menjadi Rp114.358.390.000, yang selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Samsat Keliling memberikan dampak positif terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Samsat Keliling di Kantor Samsat Praya merupakan inovasi pelayanan publik yang efektif dalam mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat. Prosedur pelayanan yang sederhana, waktu pelayanan yang relatif singkat, serta penempatan lokasi dan jadwal layanan yang teratur memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PKB, sehingga berkontribusi nyata dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil kegiatan selama magang penulis menyarankan agar kantor samsat praya terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Samsat Keliling melalui penambahan frekuensi dan wilayah pelayanan, evaluasi program secara berkala, serta penguatan sistem pembayaran berbasis digital. Selain itu, petugas diharapkan meningkatkan profesionalisme dan sosialisasi kepada masyarakat, sementara wajib pajak diharapkan semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak tepat waktu dengan memanfaatkan layanan Samsat Keliling sebagai sarana pembayaran yang mudah, cepat, dan efisien.

REFERENSI

- Arifin, F. (2024). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA* Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Fahira, N. D., Rizqy, M. F., & Aini, N. (2025). Pajak Pusat dan Pajak Daerah. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11059–11069.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3>

- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Haryanti, S., & Wijaya, K. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165.
- Irwadi, M., & Winarni, S. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir. *Jurnal Sustainability Riset Akuntansi*, 2(1), 69–88. <https://jurnal.unisti.ac.id/sustainability/article/view/279%0Ahttps://jurnal.unisti.ac.id/sustainability/article/download/279/255>
- Julfaidin, M., & Manduapessy, R. L. (2024). Efektivitas Layanan Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Timika. *Jurnal Kritis*, VIII NO 2(2), 149–176.
- Kakasih, R. A., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. . (2018). Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 124–134.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Nopita, P., Rahman, M., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *Efektivitas pelaksanaan samsat keliling dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupataten rokan hulu*. 08(1), 16–30.
- Sandy, G. (2020). BERMOTOR (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01(01), 20–29.
- Setiawati, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Aalisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten SEemarang Giffiany Fibri Setiawati , Christina Retno Gayatrie. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 1(2), 127–136.
- Simanjutak Arthur, & Ginting Mitha Christina. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5, 183–194.
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/RESTITUSI/article/download/406/276>
- Yusni, F., Madani, M., & Tahir, N. (2020). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Journal Unismuh*, Vol. 3, N, 962–972.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>